

ANALISIS KINERJA KEUANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 – 2016

Indriyani

Akademi Maritim Nusantara Cilacap

Email : indrip2cd11010@gmail.com

Tiara Pandansari

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 2014-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi fluktuasi kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Jika disorot dari keseluruhan rasio, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan secara kelancaran keuangan dan kemandirian keuangan dapat dikatakan baik, akan tetapi, jika dilihat dari tingkat pengelolaan keuangan yang dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja serta efisiensi dapat dikatakan kurang baik.

Kata kunci : Kinerja Keuangan

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia. The observation period in this research is 2014-2016. The data used in this research is secondary data that is financial report of Ministry of Marine Affairs and Fishery Republic of Indonesia. The research method is quantitative descriptive method. The results of this study indicate that the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries fluctuations in financial performance can be seen from the ratio of liquidity, solvency, efficiency, and growth. If highlighted from the overall ratio, it can be concluded that the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is in the fluency and independency of is good, however, if viewed from the level of financial management seen from the ratio of revenue and expense growth and it can be concluded to be not good enough.

Keyword : Financial Perfomance

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan media komunikasi bagi sebuah entitas untuk menyampaikan informasi – informasi keuangan atas aktivitas moneter selama periode tertentu. Informasi yang ada di dalam laporan keuangan inilah yang akan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini dikarenakan dari laporan keuangan entitas bisnis, *stakeholders* dapat menilai kinerja keuangan entitas tersebut.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (Sutrisno, 2009:53). Adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2012) adalah mengukur tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan stabilitas. Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain, dengan demikian, maka dapat dikatakan kinerja keuangan yang baik dapat menurunkan *cost of capital* perusahaan.

Senada dengan perusahaan yang memiliki orientasi bisnis, pengukuran kinerja keuangan pada entitas sektor publik dan organisasi nirlaba juga penting terutama pada era reformasi sektor publik (Dooren, Bouckaert *et al*, 2010). Reformasi sektor publik telah mengamatkan konsep *New Public Management* bagi entitas sektor publik dengan tujuan

agar dapat meningkatkan akuntabilitas yang dimiliki, sebagaimana perusahaan bisnis. Bastian (2006) menyatakan indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Publikasi indikator kinerja melayani berbagai tujuan dasar, salah satunya adalah menjamin pertanggung jawaban sektor publik. Di Indonesia, dalam sektor pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (Pandansari, 2016).

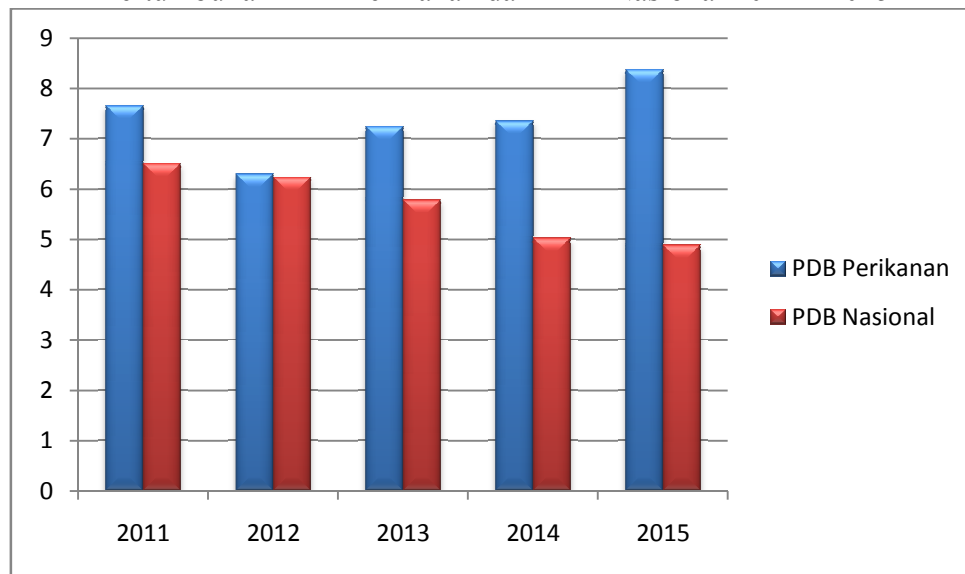
Era reformasi yang terjadi di Indonesia juga menyebabkan perubahan orientasi pembangunan yang masih berkonsentrasi pada wilayah daratan menjadi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan peluang untuk mengelola sumber daya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal, meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang, mengembangkan berbagai potensi yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan di kawasan pesisir dan lautan seperti yang

menjadi agenda prioritas presiden Joko Widodo dalam sembilan program yang dikenal dengan Nawa Cita, salah satunya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Presiden melalui Menteri Kelautan dan Perikanan membuat aturan yang lebih ketat agar dapat mendorong produksi perikanan dalam negeri. hal ini terlihat dari data yang bersumber dari Databoks, Katadata

Indonesia (2016) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Menurut statistik Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP), pada 2015 pertumbuhan PDB perikanan mencatatkan angka yang tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 8,37 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan PDB nasional yang hanya tumbuh 4,79 persen.

Gambar 1
Pertumbuhan PDB Perikanan dan PDB Nasional 2011 – 2015

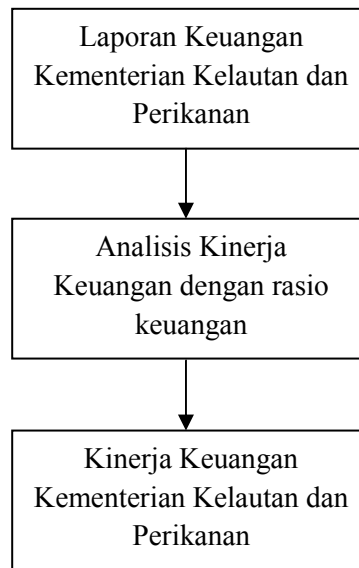


Jika dilihat dari gambar 1 di atas, terlihat bahwa PDB perikanan lebih tinggi daripada PDB Nasional. Berdasarkan latar belakang di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu bagian kementerian yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan judul “Analisis

Kinerja Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 – 2016”.

Pentingnya penilaian kinerja keuangan sebagai tolok ukur pencapaian prestasi. Dari latar belakang permasalahan yang sudah diajukan, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2
Kerangka Pemikiran



Tujuan yang akan dicapai dalam kajian ini adalah:

- a. Menganalisis kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilihat dari Rasio likuiditas periode tahun 2014 - 2016.
- b. Menganalisis kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilihat dari Rasio solvabilitas periode tahun 2014 - 2016.
- c. Menganalisis kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilihat dari Rasio Efisiensi periode tahun 2014 - 2016.
- d. Menganalisis kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilihat dari Rasio Pertumbuhan periode tahun 2014 - 2016.

2. TINJAUAN TEORI

a. Kinerja Keuangan

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi (Putri, 2013).

Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri - ciri keuangan yang tersedia. Menurut Mardiasmo (2002) terdapat empat tolok ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu : penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang

ditetapkan APBD, efisiensi biaya, efektivitas program, serta pemerataan dan keadilan.

b. New Public Management (NPM)

New Public Management dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk peningkatan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. NPM menerapkan praktek kerja sektor privat ke sektor publik.

Tujuan NPM yaitu mengubah administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi masyarakat yang harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif, namun tidak berorientasi laba (Osborne dan Gaebler, 1995 dalam Febriyanto).

NPM mulai diterapkan di Indonesia dimulai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

c. Akuntabilitas

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

d. Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency Theory merupakan suatu hubungan antara prinsipal dan agen. Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agen*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Kontrak yang dilakukan menunjukkan kesepakatan antara prinsipal sebagai pihak yang memberikan kewenangan dan agen sebagai pihak yang menerima wewenang dan bertugas memelihara, mengelola sumber daya serta melaporkan hasil kinerjanya, hubungan yang dibangun oleh kedua pihak berdasar atas kepercayaan.

Menurut Lane (2003) dalam Abdullah dan Halim menjelaskan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Menurut Andvig (2001) dalam Abdullah dan Halim, *principal agent model* sangat berguna dalam menjelaskan dua kondisi dalam organisasi publik yaitu terdapat beberapa prinsipal dengan tujuan masing – masing prinsipal bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Di dalam organisasi sektor publik, yang bertindak sebagai prinsipal adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat sedangkan Pemerintah bertindak sebagai agen.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana dalam penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan penilaian kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan. Penelitian deskriptif kuantitatif berupaya untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi (Boyd, et al.:1989 dalam Kuncoro:2003). Populasi penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, dengan sampel penelitian berupa Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia tahun 2014 – 2016.

Jenis data pada penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro :2003: 127). Adapun metode perolehan data adalah dengan memperoleh secara langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang beralamat di Jakarta.

Dalam menilai kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penelitian ini menggunakan parameter yaitu rasio keuangan. Menurut Gumanti (2007) terdapat beberapa klasifikasi rasio yaitu :

a. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan tingkat kelancaran suatu entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari :

Current Ratio

Current Ratio (Rasio lancar) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan entitas untuk membayar hutangnya yang segera harus dipenuhi menggunakan aset lancar. Dengan rumus sebagai berikut :

$$Current Ratio = \frac{Aset Lancar}{Kewajiban Jangka Pendek} \quad (1)$$

Kriteria pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan *current ratio* adalah semakin tinggi nilai *current ratio* dapat diartikan bahwa entitas memiliki kemampuan pembayaran hutang yang semakin besar.

Cash Ratio

Cash Ratio (Rasio Kas) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan total kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek

$$Cash Ratio = \frac{Kas + Setara Kas}{Kewajiban Jangka Pendek} \quad (2)$$

Kriteria pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan *cash ratio* adalah semakin tinggi nilai *cash ratio*

dapat diartikan bahwa entitas memiliki kemampuan pembayaran

kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia

b. Rasio Solvabilitas atau *leverage Ratio*

Rasio solvabilitas adalah rasio yang memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan hutang entitas artinya seberapa besar porsi hutang yang ada di entitas jika

dibandingkan dengan modal atau asset yang ada.

Debt to Asset Ratio (DAR)

Debt to Asset Ratio atau Rasio Total Hutang (Kewajiban) terhadap Asset adalah perbandingan antara jumlah total hutang dengan total asset.

$$DAR = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}} \times 100\% \quad (3)$$

Adalah rasio yang memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan hutang entitas artinya seberapa besar porsi hutang yang ada di entitas jika dibandingkan dengan modal atau asset yang ada.

c. Rasio Efisiensi

Menurut Hamzah (2008) rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan. Kriteria rasio Efisiensi adalah semakin kecil rasio ini,

maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan

Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan Rasio efisiensi dengan nilai di atas 100% tidak efisien, 90,01% - 100% kurang efisien, 80,01% - 90% cukup efisien, 60,01% - 80% efisien, di bawah 60% sangat efisien. Adapun perhitungan rasio efisiensi dapat diitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\% \quad (4)$$

d. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halimdalam Pramono (2014) rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa

periode. Jika pertumbuhan untuk masing – masing komponen pendapatan dan belanja sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$\text{Rasio pertumbuhan pendapatan} = \frac{\text{pendapatan } t_1 - \text{pendapatan } t_0}{\text{pendapatan } t_0} \times 100\% \quad (5)$$

$$\begin{aligned} &\text{Rasio pertumbuhan belanja} \\ &= \frac{\text{belanja } t_1 - \text{belanja } t_0}{\text{belanja } t_0} \times 100\% \end{aligned} \quad (6)$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan pengembangan ide atas pengembangan konsep *New Public Management*, selain penggunaan konsep akrual pada laporan keuangan, diharapkan entitas pemerintahan juga dapat melakukan mewujudkan kinerja secara professional. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi tambahan yaitu menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan yang biasa dipakai di dalam perusahaan ke dalam laporan keuangan pemerintahan.

Analisis pengukuran Kinerja Keuangan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 23. Berikut ini adalah hasil

pengolahan data atas rasio – rasio yang telah ditentukan.

a. Rasio Likuiditas

Berikut ini adalah kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014 – 2016 dilihat dari rasio Likuiditas:

Current Ratio (Rasio Lancar)

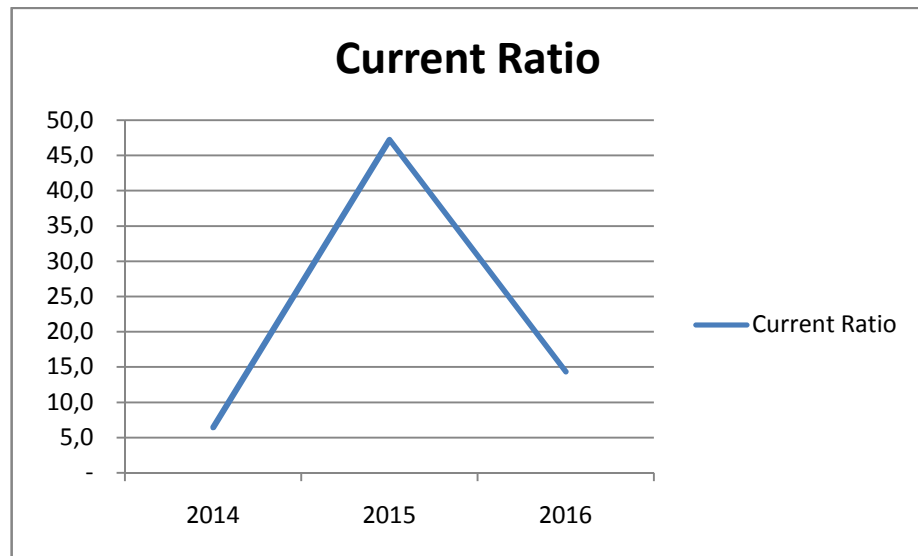
Current Ratio (Rasio lancar) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan entitas untuk membayar hutangnya yang segera harus dipenuhi menggunakan aset lancar. Rasio Lancar ini diperoleh dengan membagi Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek. Adapun hasil perhitungan *Current Ratio* Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Perhitungan *Current Ratio*

Tahun Pengamatan	<i>Current Ratio</i>
2014	6.440
2015	47.199
2016	14.328
<i>Maximum</i>	47.199
<i>Minimum</i>	6.440
<i>Mean</i>	22.657

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (diolah)

Gambar 3
Current ratio tahun 2014 – 2016



Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai rasio lancar (*current ratio*) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 47,199, sedangkan nilai rasio lancar terendah terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,440. Adapun rata – rata rasio lancar KKP adalah sebesar 22,657. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari Rasio lancar yang ada, secara rata – rata, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kemampuan yang tinggi untuk pembayaran kewajiban yang segera jatuh

tempo. Secara rata – rata Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki jumlah aset lancar sebesar 22 kali lebih besar daripada jumlah kewajiban yang harus segera dilunasi.

Cash Ratio (Rasio Kas)

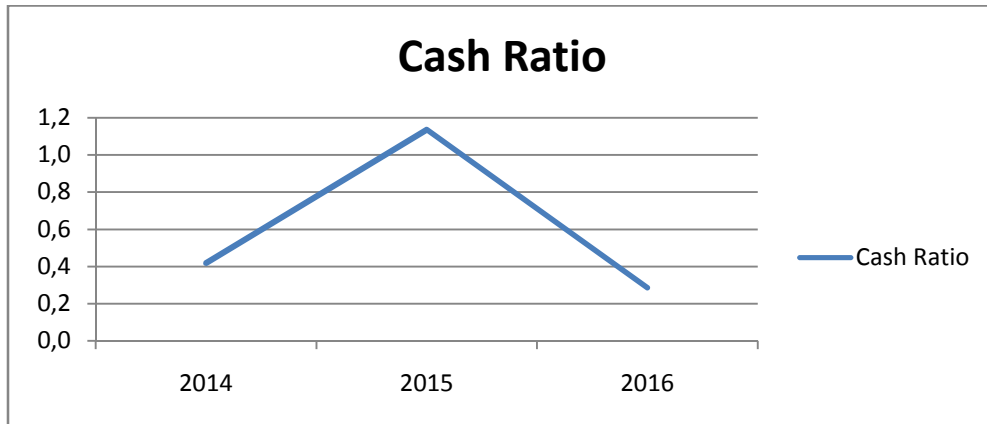
Cash Ratio (Rasio kas) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Rasio Kas ini diperoleh dengan membagi Kas dan Setara kas terhadap Kewajiban Jangka Pendek. Adapun hasil perhitungan *Cash Ratio* Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Perhitungan *Cash Ratio*

Tahun Pengamatan	<i>Cash Ratio</i>
2014	0.419
2015	1.135
2016	0.286
<i>Maximum</i>	1.135
<i>Minimum</i>	0.286
<i>Mean</i>	0.614

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (diolah)

Gambar 4
Cash Ratio Tahun 2014 - 2016



Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai rasio kas (*cash ratio*) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.135, sedangkan nilai rasio kas terendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 0.286. Adapun rata – rata rasio kas KKP adalah sebesar 0,614. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari Rasio kas yang ada, secara rata – rata, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kemampuan yang tinggi untuk pembayaran kewajiban yang segera jatuh tempo. Secara rata – rata Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki jumlah aset lancar sebesar 0,6 kali lebih besar

daripada jumlah kewajiban yang harus segera dilunasi.

b. Rasio Solvabilitas atau *leverage Ratio*

Berikut ini adalah kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014 - 2016 dilihat dari rasio Solvabilitas. Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Asset Ratio (DAR)*:

Debt to Asset Ratio (DAR)

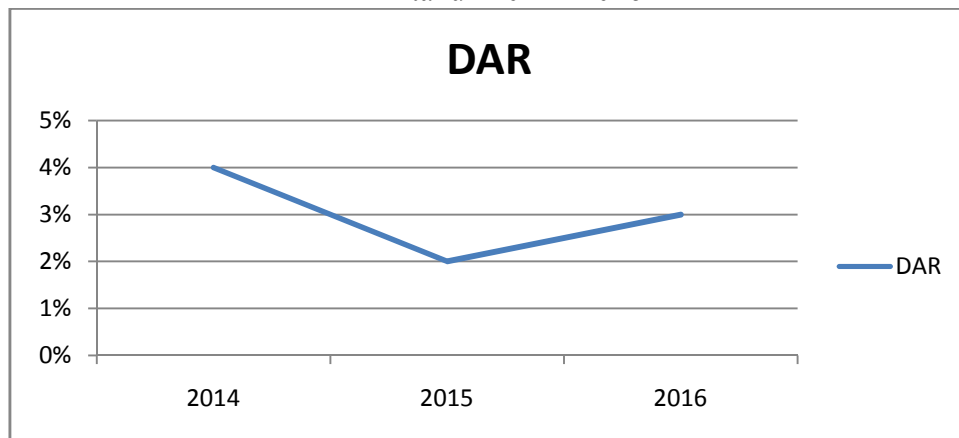
Debt to Asset Ratio adalah rasio yang mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari pinjaman . *Debt to Asset Ratio* ini diperoleh dengan membagi Total Hutang dengan Total Aset. Adapun hasil perhitungan *DAR* Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Perhitungan *DAR*

Tahun Pengamatan	<i>DAR</i>
2014	4%
2015	2%
2016	3%
<i>Maximum</i>	3%
<i>Minimum</i>	2%
<i>Mean</i>	3%

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (diolah)

Gambar 5
DAR tahun 2014 - 2016



Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Debt to Asset Ratio* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 4% sedangkan nilai *DAR* terendah terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 2%. Adapun rata – rata *DAR* KKP adalah sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari *DAR* yang ada, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalami fluktuasi dalam hal permodalan yang berasal dari pinjaman. Pada tahun 2015 merupakan kinerja

Kementerian Kelautan dan perikanan tertinggi karena ditahun tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya menggunakan 2% dana yang bersumber dari pinjaman.

c. Rasio Efisiensi

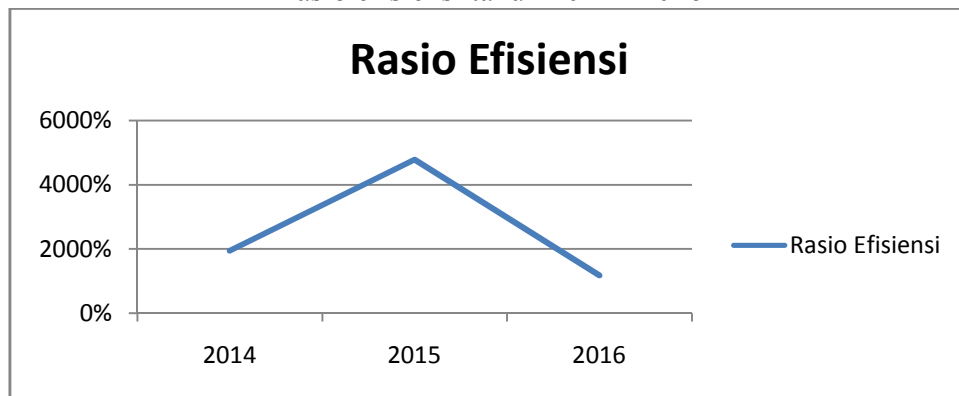
Rasio Efisiensi adalah rasio rasio yang menggambarkan perbandingan *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan. Adapun hasil perhitungan Rasio Efisiensi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun Pengamatan	Rasio Efisiensi
2014	1943%
2015	4783%
2016	1171%
<i>Maximum</i>	4783%
<i>Minimum</i>	1171%
<i>Mean</i>	2632%

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (diolah)

Gambar 6
Rasio efisiensi tahun 2014 - 2016



Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai rasio efisiensi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 4783%, sedangkan nilai rasio efisiensi terendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 1171%.Dilihat dari perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja dari segi efisiensi KKP mengalami fluktuasi.Sedangkan, jika dilihat dari rata – rata rasio efisiensi KKP adalah sebesar 2632%. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata dilihat dari Rasio Efisiensi kinerja KKP

menunjukkan kinerja yang tidak efisien.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode.

Berikut ini adalah kinerja keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014 - 2016 dilihat dari rasio Pertumbuhan :

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Adapun hasil perhitungan rasio pertumbuhan

pendapatanKementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai

berikut:

Tabel 5
Hasil Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan

Tahun Pengamatan	Rasio pertumbuhan Pendapatan
2014	-4,9%
2015	-35,8%
2016	18,54%
<i>Maximum</i>	18,54%
<i>Minimum</i>	-35,8%
<i>Mean</i>	48,3%

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (diolah)

Gambar 7
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2014 -2016



Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatanKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,54%, sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan terendah terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar -35,8%. Adapun rata – rata rasio

pertumbuhan pendapatan KKP adalah sebesar 48,3%.

Rasio Pertumbuhan Belanja

Adapun hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanjaKementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Perhitungan rasio pertumbuhan belanja

Tahun Pengamatan	Rasio pertumbuhan Belanja
2014	-10,7%
2015	58,1%
2016	-30,1%
<i>Maximum</i>	58,1%
<i>Minimum</i>	-30,1%
<i>Mean</i>	5,81%

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (diolah)

Gambar 8
Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun 2014 - 2016



Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa nilai rasio pertumbuhan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 58,1%, sedangkan nilai pertumbuhan belanja rendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar -30,1%. Adapun rata – rata pertumbuhan belanja KKP adalah sebesar 5,81%. Selain itu, jika dibandingkan dengan rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja lebih rendah

daripada rasio pertumbuhan pendapatan, artinya KKP memiliki kemampuan untuk mempertahankan kinerjanya dalam memperoleh pendapatan dari periode ke periode.

5. KESIMPULAN

Dari data hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kementrian Keuangan dan Perikanan tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi di masing –

masing ukuran kinerja. Rasio Likuiditas menunjukkan hasil terbaik di tahun 2015. Pada tahun 2015, rasio likuiditas yang diukur dengan menggunakan rasio lancar (*current ratio*) sebesar 47,199 dan rasio kas (*cash ratio*) sebesar 1,135. Kinerja keuangan KKP dilihat dari rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang tidak efisien karena selama tahun 2014-2016 rasio efisiensi berada di atas 60%. Ketidakefisienan terbesar terjadi di tahun 2015, dimana KKP memiliki nilai rasio efisiensi sebesar 4783%. Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi ketimpangan tinggi antara pengeluaran dan penerimaan yang terjadi pada KKP. Kinerja keuangan dilihat dari rasio solvabilitas yang diukur dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* terbaik terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa KKP memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dari segi pendanaan, dimana dari kekayaan bersih yang dimiliki, hanya 2% yang berasal dari pinjaman. Dari sisi rasio pertumbuhan, di tahun 2015 KKP memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan yang rendah (-35,8%) dan KKP memiliki tingkat pertumbuhan belanja yang tinggi (58,1%). Jika disorot dari keseluruhan rasio, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan secara kelancaran keuangan dan kemandirian keuangan dapat dikatakan baik, akan tetapi, jika dilihat dari tingkat pengelolaan keuangan yang dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja serta efisiensi dapat dikatakan kurang baik. Hal ini mengimplikasikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan

beum bisa maksimal dalam hal pengelolaan dana yang mereka miliki. Dana yang dimiliki sebagian besar masih digunakan untuk belanja yang mana mengakibatkan titik efisiensi kurang baik.

6. REFERENSI

- Bastian, I.2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Bagian Penerbitan Salemba Empat, Jakarta.
- Dooren, W.V, Geert, Bouckaert, and John Halligan.2010, *Perfomance Management in the Public Sector*,Routledge.
- Febriyanto, I.I. “Dialektika kebijakan publik : Studi Komparasi Teori New Public Management Dengan Good Governance Dalam Persepktif Kebijakan Publik”
- Gumanty, T.A. 2007, *Manajemen Investasi : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Center of Studies, Jember.
- Halim, A. 2001, *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat,
- Indriyani, Pandansari. 2016, “Pengaruh PDRB dan Aset Terhadap Penerimaan Daerah Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah”,
- Jensen, M.C dan Meckling William H.1976. “Theory of The Firm Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure”. *Journal of Financial Economics*,

- October, 1976, Vol 3, No.4,305 – 360.
Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1994.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Munawir, S. 2012, *Analisis Informasi Keuangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Pandansari, T. 2016, “Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 19(3), 463-484.
- Pramono, J. 2014, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)”, *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, Vol 7(13),
- Putri, N.R. 2013, “Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah)”. *Tesis*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Rusmana O, Warsidi dan Afiah Nunuy, *Akuntansi Sektor Publik*, Modul Kuliah dalam Omanrsm.blogspot.com
- Sularso, H dan Restianto Yanuar E.2011, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah”, *Media Riset Akuntansi*, Vol 1(2),
- Sutrisno. 2009, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Undang – Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/19/pertumbuhan-pdb-perikanan-tertinggi-dalam-5-tahun>
- www.bps.go.id
www.kkp.go.id
www.kpu.go.id